

SOSIALISASI DAN EDUKASI PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 BERBASIS MASYARAKAT

Peningkatan Kapasitas SIBAT PMI Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung

Ruhanda¹, Fitriana Sidikah Rachman², Sriwati³

¹²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana

¹ruhanda@unla.ac.id

²fitrisidikah@unla.ac.id

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Langlangbuana

³hj.sriwati@unla.ac.id

Abstract

The government has declared the Covid-19 pandemic a national disaster. Since then, various regulations related to preventing the spread of Covid-19 have been issued. The government's policy must be followed by the whole community. Policy socialization can be adopted more quickly with community participation. First, by participating in implementing the policy and second, participating in disseminating the policy. PMI as a national humanitarian institution also plays a role. Through PMI's SIBAT Team, government policies can be disseminated to the public. The Abdimas team then helped train the SIBAT team in order to increase their capacity and assist in the implementation of community-based outreach programs.

Keywords: Capacity, Socialization, Health Protocol, SIBAT PMI

Abstrak

Pandemi Covid-19 dinyatakan pemerintah sebagai bencana nasional. Sejak itu berbagai peraturan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 dikeluarkan. Kebijakan pemerintah tersebut harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Sosialisasi kebijakan bisa lebih cepat teradopsi dengan adanya partisipasi masyarakat. Pertama, dengan ikut melaksanakan kebijakan dan kedua, ikut mensosialisasikan kebijakan. PMI sebagai lembaga kemanusiaan nasional turut berperan. Melalui Tim SIBAT PMI, kebijakan pemerintah dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Tim Abdimas kemudian membantu melatih tim SIBAT agar dapat meningkatkan kapasitasnya dan pendampingan pelaksanaan program sosialisasi berbasis masyarakat.

Kata kunci: Kapasitas, Sosialisasi, Protokol Kesehatan, SIBAT PMI

PENDAHULUAN

Sejak kasus pertama Covid-19 dinyatakan ada di Indonesia pada 2 Maret 2020 dan kemudian jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah, Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No 12 tahun 2020 secara resmi menyatakan Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020. Keputusan itu berlanjut dengan dikeluarkannya keputusan-keputusan lain mulai dari tingkat nasional hingga Daerah tingkat I/II, terkait dengan berbagai upaya penanggulangan Pandemi Covid-19; antara lain Instruksi Mendagri No. 6 tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan

untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Protokol Kesehatan yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah:

Memakai Masker

1. Mencuci Tangan dengan Benar
2. Menjaga Jarak
3. Menjauhi Kerumunan
4. Menghindari Mobilitas

Peraturan-peraturan di tingkat pusat itu kemudian diadopsi menjadi peraturan-peraturan pemerintah daerah tingkat I dan II antara lain dengan keluarnya Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur Jawa Barat dan Peraturan Walikota Bandung sebagai pelaksanaan peraturan-peraturan diatas di tingkat daerah. Agar berbagai peraturan

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya sosialisasi dan tentunya penegakan peraturan sehingga tujuan pemerintah yaitu mencegah semakin meluasnya penyebaran Covid-19 di masyarakat dapat terwujud. Penegakan peraturan tentunya dilakukan oleh perangkat daerah. Namun sosialisasi dapat dilakukan oleh seluruh pihak / berbagai komponen masyarakat. Tanpa adanya keterlibatan semua pihak, tentu akan sulit menjangkau seluruh komponen masyarakat terutama yang ada di tingkat bawah di satuan-satuan terkecil yaitu keluarga, dengan berbagai karakter masyarakat yang ada. Erman I. Rahim, dalam tulisannya tentang Partisipasi dalam Perspektif Kebijakan Publik menyebutkan, “Dalam argumen efisiensi, Cleaver mengatakan bahwa partisipasi adalah sebuah instrumen atau alat untuk mencapai hasil dan dampak program/kebijakan yang lebih baik, sedangkan dalam argumen demokratisasi dan pemberdayaan, partisipasi adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas individu-individu, sehingga menghasilkan sebuah perubahan yang positif bagi kehidupan mereka (dalam Cooke dan Kothari, 2002:37).”¹ Untuk itu kegiatan PKM dengan upaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui kelompok SIBAT PMI sebagai penyambung/penyampai kebijakan protokol kesehatan Covid-19 di tingkat masyarakat, sejalan dengan teori kebijakan publik tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan Pasal 22F yang menyebutkan bahwa “PMI bertugas membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri”, maka PMI (Palang Merah Indonesia) Pusat segera mengeluarkan instruksi dan berbagai aturan serta protokol yang berlaku internal sebagai panduan bagi PMI Provinsi dan PMI Kota/Kab Se-Indonesia dalam merespon kejadian Pandemi Covid-19. Salah satu panduan yang

dikeluarkan adalah tentang bagaimana PMI memobilisasi relawan di masyarakat yang disebut SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) dalam merespon Pandemi Covid-19.

Berikut uraian peran SIBAT dalam merespon pandemi Covid-19 sebagaimana yang tercantum dalam Protokol PMI Pelibatan Masyarakat Oleh SIBAT Dalam Menghadapi Covid-19: Palang Merah Indonesia (PMI) memobilisasi para relawannya yang berada di masyarakat atau SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) untuk menjadi ujung tombak dalam mendiseminasikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan komunikasi risiko hingga ke level masyarakat di kelurahan atau desa. Dalam situasi pandemi atau wabah COVID-19, SIBAT diharapkan mampu menjadi salah satu sumber informasi di lingkungan masyarakat mengenai edukasi dalam pemahaman, pencegahan, seruan untuk perubahan perilaku dan menjadi sumber informan terpercaya untuk informasi COVID-19 di Desa/Kecamatan/Kelurahannya. SIBAT juga diharapkan dapat melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat dan mencatat saran, pertanyaan, atau keluhan masyarakat mengenai COVID-19 atau apa yang dibutuhkan masyarakat.

Namun demikian, tidak semua anggota SIBAT memiliki kapasitas yang sama dalam hal melakukan sosialisasi khususnya terkait materi Covid-19. Untuk itulah tim PKM Universitas Langlangbuana kemudian melakukan kegiatan peningkatan kapasitas sebagai salah satu percontohan bagi tim SIBAT kecamatan di Kota Bandung. Adapun berdasarkan rekomendasi dan penilaian yang ada, maka tim SIBAT yang dipilih adalah yang berlokasi di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Namun demikian dalam melakukan pelatihan, ada beberapa perwakilan anggota tim SIBAT dari kecamatan lainnya.

¹Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Erman I. Rahim, https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1

METODE

PMI Kota Bandung memiliki 30 tim SIBAT yang tersebar di 30 wilayah kecamatan. Pada saat pemilihan lokasi PKM, Kecamatan Sukajadi berada pada posisi pertama dan beberapa waktu sebelum dan sesudahnya, berada di posisi 10 besar kecamatan yang terdapat suspect dan penderita Covid-19 terbesar diantara 30 kecamatan yang ada. Adapun dari sisi keaktifan, tim PMI Kecamatan Sukajadi memiliki anggota yang aktif dan tim sering melakukan kegiatan mandiri seperti melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan wilayah kecamatan Sukajadi. Untuk itulah Tim SIBAT PMI Kecamatan Sukajadi dipilih sebagai tim lokasi Pengabdian, dengan upaya meningkatkan kapasitas anggota tim, agar lebih berdaya dalam melakukan kegiatan terkait respon pandemi Covid-19 di lingkungan kecamatannya.

Untuk metode yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas, Tim Abdimas melakukan pelatihan dengan workshop untuk para peserta anggota SIBAT. Workshop difasilitasi oleh Tim Abdimas untuk mengasah kemampuan peserta. Mengingat pada saat melakukan workshop, situasi kondisi masih dalam masa PPKM dimana kegiatan tatap muka masih terbatas, maka workshop dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom. Adapun materi workshop meliputi:

1. Pengetahuan tentang program kegiatan PMI khususnya terkait penanganan Pandemi Covid-19.
2. Pengetahuan tentang edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat khususnya anak-anak.
3. Pengetahuan tentang ilmu komunikasi. Pengetahuan yang diberikan kepada anggota SIBAT adalah tentang Penggunaan Media Komunikasi yang tepat sesuai dengan audience dan Komunikasi persuasif.

Oleh karena pada saat melakukan kegiatan PKM, kebijakan pemerintan adalah memulai Percobaan Pertemuan Tatap Muka (PTM) untuk siswa sekolah, maka sebagai pelaksanaan kegiatan, tim SIBAT

melakukan sosialisasi kepada anak-anak usia sekolah. Dipilihnya anak-anak/siswa sekolah sebagai kegiatan sosialisasi, karena mengikut perkembangan kebijakan pemerintah yang memang selalu berkembang mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Selain itu, secara umum kebijakan sosialisasi protokol kesehatan dari PMI Pusat juga mengarah pada sosialisasi prokes di sekolah mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA.

Media komunikasi untuk protokol kesehatan di sekolah sudah dibuat oleh PMI Pusat. Jadi anggota PMI termasuk SIBAT tinggal mempelajari dan menggunakannya untuk kegiatan sosialisasi protokol kesehatan di sekolah. Media komunikasi yang telah disiapkan oleh PMI Pusat ada dalam bentuk video, poster maupun materi KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) lainnya. Berikut beberapa materi KIE yang ada, yang dapat digunakan sesuai kebutuhan di lapangan:

1. Video Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah (<https://pustakapmi.id/videos/video-aman-pembelajaran-tatap-muka-disekolah/>)
2. Game Covid Fighter (<https://pustakapmi.id/2021/09/17/publikasi/game-covid-fighter-palang-merah-indonesia/>)
3. Poster Belajar di Sekolah Saat Pandemi (<https://pustakapmi.id/images/poster-belajar-di-sekolah-saat-pandemi/>)
4. Lagu/Jingle Tangkal Covid (<http://pustakapmi.id/audios/jingle-tangkal-covid-childrens-vocal/>)

Anggota SIBAT diberikan keempat KIE diatas dan pembelajaran bagaimana penggunaannya yang efektif sesuai dengan audiens.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selain melalui serangkaian pelatihan dan simulasi, Tim SIBAT juga didampingi untuk menyusun program kegiatan di masyarakat, apa saja yang akan mereka lakukan terkait program sosialisasi prokes di sekolah. Adapun beberapa kegiatan dilakukan, dan sebagai kegiatan perdana

adalah melakukan sosialisasi pada Hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, Pukul 08:30 – 10:00 WIB diikuti oleh 4 orang guru dan 20 orang anak PAUD. Kegiatan dimulai dengan memberikan contoh membersihkan tangan dengan benar, memberikan contoh memakai masker yang benar, bercerita tentang virus Covid-19 dan kemudian bernyanyi dan bermain bersama dengan lagu ‘Tangkal Covid’. Berikut kegiatan yang dilakukan:

1. Membantu dan mengajari anak mencuci tangan yang benar
2. Mengecek suhu anak
3. Membantu dan mengajari anak memakai masker yang benar
4. Bercerita tentang virus covid-19 dan mengapa kita harus menjaga kesehatan
5. Bermain dan bernyanyi bersama jingle ‘Tangkal Covid’

Laporan kegiatan ini juga disampaikan kepada struktural PMI sebagai laporan kegiatan mandiri diluar laporan kegiatan rutin yang merupakan kegiatan organisasi. Berikut Hasil Kegiatan Pengabdian:

1. Penguatan Kapasitas Individu. (a) Adanya tambahan pengetahuan tentang ruang lingkup kegiatan PMI dalam merespon Pandemi Covid-19, yaitu tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat namun juga berperan dalam bidang sosialiasi dan komunikasi terkait protokol kesehatan; (b) Adanya tambahan pengetahuan tentang media komunikasi dan penggunaannya yang sesuai dengan audience. PMI memiliki berbagai media komunikasi /KIE, yang dapat digunakan sesuai dengan target audience; dan (c) Adanya tambahan pengetahuan tentang komunikasi persuasif, yaitu bagaimana anggota SIBAT
2. Penguatan Kapasitas Organisasi. (a) im SIBAT memiliki program untuk sosialisasi protokol kesehatan dan tidak hanya merespon permintaan masyarakat misalnya melakukan penyemprotan desinfektan saja; (b) Dengan adanya kegiatan sosialisasi, bertambah jumlah anggota Tim SIBAT yang bisa aktif; karena tidak hanya akan memobilisasi

anggota yang bisa melakukan penyemprotan saja tapi juga dapat memobilisasi anggota SIBAT lainnya sesuai dengan kompetensi yang ada; (c) Tim berinisiatif membuat produk KIE yaitu SOP PTM Terbatas bagi siswa sekolah. SOP dapat menjadi panduan bagi masing-masing personel untuk melakukan sosialisasi di lingkungannya. SOP juga direncanakan akan diperbanyak agar dapat dibagikan ke masyarakat lingkungan sekitar atau di pasang di tempat yang mudah diakses / dilihat masyarakat dalam bentuk yang lebih besar, misalnya X-banner, poster atau spanduk.

KESIMPULAN

Sebagaimana disampaikan oleh Cleaver dalam tulisan Erman I Rahim, dikatakan bahwa partisipasi adalah sebuah instrumen atau alat untuk mencapai hasil dan dampak program/kebijakan yang lebih baik, maka bisa disimpulkan bahwa dengan adanya dukungan partisipasi publik, kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah dapat lebih cepat terealisasi dan berdampak lebih baik di masyarakat sebagai obyek dari kebijakan itu sendiri. Dan partisipasi bisa dilakukan antara lain dengan 2 (dua) hal, yaitu pertama, dengan langsung menjalankan kebijakan pemerintah, dan kedua, dengan ikut mensosialisasikan kebijakan tersebut agar lebih merata tersosialisasi di tingkat masyarakat. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh Tim SIBAT adalah keduanya; Yaitu selain ikut melaksanakan kebijakan dengan melakukan segala kegiatan sesuai protokol kesehatan, namun juga ikut aktif berperan sebagai pihak yang ikut mensosialisasikan kebijakan di tingkat masyarakat. Dan, dari hasil kegiatan di lapangan, terlihat bahwa jika penyampaian kebijakan yang merupakan bagian dari perubahan perilaku dengan menjalankan protokol kesehatan dalam segala sendi kehidupan-disampaikan oleh peer grupnya, dalam hal ini adalah masyarakat itu sendiri, maka lebih mudah diterima dibandingkan dengan hanya melihat arahan atau himbauan dari saluran resmi seperti penyampaian kebijakan di

media oleh pemangku kebijakan.

REFERENSI

- Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Erman I. Rahim, https://repository.ung.ac.id/get/simlit_re s/1/327/Partisipasi-Dalam-Perspektif-Kebijakan-Publik.pdf
- Grindle, M.S (1997), *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, Boston, MA: Harvard Institute for International Development. Hurlock dalam Langgersari Elsari Novianti (2009).
- Makalah Perkembangan Sosial pada Anak Homeschooling Usia Sekolah Dasar (6-12 Tahun), Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Milen, Anelli. 2004.
- Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja. Sari, Shinta Permata. 2006.
- Pengaruh Kapasitas Individu yang Diinteraksikan dengan Locus of Control Terhadap Budgetary Slack. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang. S Aisyah, M Amini, T Chandrawati, D Novita, 2008.
- Perkembangan Dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini, Jakarta: universitas terbuka.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.
- Badan Pusat Statistik, Kecamatan Sukajadi Dalam Angka 2019, BPS Kota Bandung 2020.
- Surat Edaran Nomor 6 tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) sebagai Bencana Nasional.
- Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)